



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN
SUB UNIT KERJA : BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAERUDIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
3. NHK : 214739

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 985.187.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 314.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/54 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 193.842.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/55 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.545.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/40 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 211.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 279.500.000

1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 254.700.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 68.900.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 465.274.315**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.798.861.315

III. HUTANG Rp. 145.170.088



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.653.691.227

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.